



Dana Bangun Pasar Rp65 M

Kota Yogyakarta Masuk Jaringan Pengembangan Koridor Ekonomi Berbasis Pariwisata

YOGYAKARTA (SI) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta sebagian besar tersedot untuk pembangunan pasar. Total anggaran yang disediakan untuk membangun kawasan bisnis ini diperkirakan mencapai Rp65 miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk membangun Pasar Ngasem senilai Rp17 miliar (sebagian besar APBN), Pasar Wisata *Hobbyist* Dongkelan Rp5,5 miliar, Pasar Talok dan Tunjungsari Rp1,7 miliar, Pusat Seni Kerajinan Yogyakarta (PSKY) Rp4 miliar dan realisasi program pasar dalam taman di 31 pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta dengan anggaran yang mencapai lebih dari Rp500 juta.

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Aman Yuridijaya mengatakan, besarnya alokasi dana untuk pembenahan pasar di Kota Yogyakarta tidak ditanggung sepenuhnya oleh pemkot. Pemerintah Pusat nantinya ikut mengalokasikan anggaran secara khusus. Contoh, untuk PSKY, Departemen Perdagangan (Depdag) memberikan bantuan senilai Rp3 miliar.

"Departemen Pariwisata dan Budaya juga nantinya ikut berpe-

ran dalam mempromosikan PSKY," katanya kemarin.

Bantuan Pemerintah Pusat nantinya juga dikucurkan untuk pembenahan Pasar Burung Ngasem. Total anggaran yang dikucurkan untuk penataan Pasar yang cukup legendaris di Kota Yogyakarta ini diperkirakan mencapai Rp17 miliar. Hanya saja, *sharing* anggaran belum bisa dipastikan, seberapa besar yang ditanggung APBN, APBD Provinsi ataupun APBD Kota Yogyakarta. Kewenangan Pemkot saat ini adalah merelokasi pedagang Pasar Ngasem ke tempat baru di Pasar Dongkelan.

Dukungan anggaran dari pemerintah pusat ini, kata dia, menyusul ditetapkannya Kota Yogyakarta dan

empat daerah lainnya, yakni Sleman, Magelang, Kota Surakarta dan Sragen sebagai jaringan pengembangan koridor ekonomi berbasis pariwisata. "Selama ini pemerintah pusat tidak begitu memperhatikan jika hanya satu wilayah saja. Tapi setelah beberapa wilayah terintegrasi, pusat akhirnya melirik dan memberikan dukungan," terangnya.

Selain menyiapkan pembangunan fisik, lanjut Aman, pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Untuk PSKY rencananya akan dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hanya saja bagaimana bentuk BUMD ini, Aman mengaku masih dalam tahap perumusan. "Begitu pula untuk menentukan siapa saja yang nantinya akan menempati kios-kios yang disediakan. Kami menunggu pembangunan fisik selesai dilakukan," urainya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Yogyakarta Anis Sri Lestari mengatakan, sepanjang pembangunan pasar ini ditujukan untuk memperdayakan ekonomi khususnya masyarakat kecil, maka Dewan tidak akan mempersoalkannya. Hanya saja, kata dia, yang perlu diperhatikan adalah komunikasi baik dengan masyarakat di lokasi pembangunan maupun dengan pedagang.

"Di beberapa lokasi pembangunan pasar terjadi penolakan dari masyarakat dan pedagang. Ini perlu jadi perhatian," tegasnya.

(arif budianto)

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <i>Din. Pengelolaan Pasar Bappeda</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pengelolaan Pasar	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005